

EFEKTIVITAS KINERJA TENAGA PENGGERAK DESA DAN KELURAHAN DALAM REALISASI PROGRAM KB DI KECAMATAN CIAMIS KABUPATEN CIAMIS

VENNI SUKMAWATI

ABSTRAK

Berdasarkan hasil observasi efektivitas kinerja Tenaga Penggerak Desa dan Kelurahan dalam realisasi program KB di Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis kurang dilaksanakan dengan optimal. Hal ini dikarenakan Tenaga Penggerak Desa (TPD) dalam penyuluhan kurang melakukan pendekatan secara personal/perorangan, Tenaga Penggerak Desa (TPD) hanya memberikan materi bersifat teoritis tanpa didukung oleh peragaan, Minimnya alat bantu penyuluhan yang berfungsi sebagai perantara yang dapat dipercaya menghubungkan antara penyuluh dengan sasaran sehingga pesan atau informasi kurang jelas dan nyata. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka yang menjadi rumusan masalahnya adalah : 1) Bagaimana efektivitas kinerja Tenaga Penggerak Desa dan Kelurahan dalam realisasi program KB di Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis?, 2) Bagaimanakah hambatan-hambatan dalam mewujudkan efektivitas kinerja Tenaga Penggerak Desa dan Kelurahan dalam realisasi program KB di Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis?, 3) Bagaimana upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam mewujudkan efektivitas kinerja Tenaga Penggerak Desa dan Kelurahan dalam realisasi program KB di Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis?

Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif analisis. Informan sebanyak 13 orang yang terdiri dari Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas PPKBP3A Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis sebanyak 1 orang, Tenaga Penggerak Desa (TPD) di Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis sebanyak 6 orang, Mitra kerja Program KB Tingkat Desa dalam hal ini Kader Sebanyak 6 orang. Teknik pengumpulan data adalah studi kepustakaan, studi lapangan (observasi dan wawancara) dan dokumentasi. Penulis menggunakan teknik analisis data kualitatif melalui pengolahan data hasil wawancara dan observasi untuk ditarik kesimpulan sehingga dapat menjawab permasalahan dalam penelitian.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa efektivitas kinerja Tenaga Penggerak Desa dan Kelurahan dalam realisasi program KB di Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis kurang dilaksanakan dengan optimal. hal ini di karenakan Tenaga Penggerak Desa yang kurang pro aktif untuk menggerakkan kader dalam menyusun jadwal pertemuan, kurangnya merangkul tokoh masyarakat baik formal maupun non formal menyebabkan kurang mendapatkan dukungan, kurangnya transparansi sumber dana dari kantor, kurangnya pemahaman dari para petugas TPD terkait dengan penggunaan sumber alokasi dana yang harus di gunakan secara efektif dan efisien, kurangnya dilakukan pengawasan oleh pimpinan sehingga kurang mengetahui kesesuaian antara pelaksanaan dengan kondisi di lapangan.

Adanya hambatan-hambatan yang dirasakan seperti kurangnya kepedulian sebagian masyarakat yang mau menjadi kader, masih ada sebagian petugas TPD yang kurang mempersiapkan perencanaan yang matang, kurangnya transparansi sumber dana dari kantor, belum adanya petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis tentang penggunaan alokasi dana yang efektif dan efisien, adanya petugas TPD yang jarang turun langsung ke lapangan, masih ada petugas TPD yang kurang lengkap dalam membuat laporan, belum adanya pusat konseling di Desa, kurangnya dilakukan sosialisasi. Adanya upaya-upaya yang dilakukan seperti merangkul tokoh formal dan informal untuk mengajak dan memilih masyarakat untuk mau berpartisipasi, mempersiapkan perencanaan yang matang dan merangkul semua elemn masyarakat, meminta kepada pimpinan untuk menyampaikan sumber dana secara transparan, mengeluarkan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis tentang penggunaan alokasi dana yang efektif dan efisien, memberikan sanksi administrasi sampai dengan sanksi yang terberat terhadap para petugas TPD yang jarang turun langsung ke lapangan, memberikan pengarahan dan pembinaan terhadap para petugas TPD cara pembuatan laporan, menyediakan pusat konseling di Desa/Kelurahan, melakukan sosialisasi dengan turun langsung ke masyarakat untuk memberikan informasi terkait dengan program KB.

Kata Kunci : Efektivitas, Kinerja Tenaga Penggerak Desa, Realisasi Program

A. PENDAHULUAN

Efektivitas kinerja perseorangan atau pegawai dalam istilah administrasi pemerintahan disebut aparatur determinasi pengawasan pimpinan, etos kerja pegawai bersangkutan dan kedisiplinan pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsi yang menjadi tanggung jawabnya.

Program Keluarga Berencana Nasional Merupakan salah satu program sosial dasar yang sangat penting artinya bagi kemajuan suatu bangsa. Program ini memberikan kontribusi yang besar bagi pembangunan sumber daya manusia pada masa kini dan masa yang akan datang, yang menjadi sumber daya yang menjadi prasyarat bagi kemajuan dan kemandirian bangsa.

Kegiatan program KB di Kecamatan Ciamis memerlukan dukungan berbagai pihak. Oleh karenanya, UPTD PPKBP3A selalu bermitra dengan menggandeng berbagai elemen baik dari kalangan pemerintah, swasta, LSM, organisasi profesi, akademis, tokoh masyarakat, tokoh agama yang mempunyai komitmen tinggi terhadap program KKB. Ini dimaksudkan dalam upaya meningkatkan cakupan pelayanan. Pendidikan dan Pelatihan bagi Tenaga Penggerak Desa dan Tenaga Penggerak Kelurahan khususnya di Kabupaten Ciamis yang selanjutnya disebut TPD dan TPK bertujuan untuk memberikan pengarahan agar program KB bisa berjalan dengan baik dan lancar di lapangan dalam rangka meningkatkan pelayanan.

Berdasarkan hasil pengamatan di lapangan menunjukkan bahwa efektivitas kinerja tenaga penggerak desa dan kelurahan dalam realisasi program KB belum optimal, Hal ini terlihat dari beberapa indikator yang antara lain sebagai berikut: 1) Tenaga Penggerak Desa (TPD) dalam penyuluhan kurang melakukan pendekatan secara personal/perorangan sehingga mengakibatkan petugas kurang menciptakan situasi keserasian dengan masyarakat dan menegakkan keserasian program. 2) Tenaga Penggerak Desa (TPD) hanya memberikan materi bersifat teoritis tanpa didukung oleh peragaan dan contoh, sehingga banyak masyarakat yang kurang memahami secara jelas materi yang disampaikan petugas. 3) Minimnya alat bantu penyuluhan yang berfungsi sebagai perantara yang dapat dipercaya menghubungkan antara penyuluh dengan sasaran sehingga pesan atau informasi kurang jelas dan nyata.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis dapat merumuskan permasalahannya, sebagai berikut: 1) Bagaimana efektivitas kinerja Tenaga Penggerak Desa dan

Kelurahan dalam realisasi program KB di Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis?, 2) Bagaimanakah hambatan-hambatan dalam mewujudkan efektivitas kinerja Tenaga Penggerak Desa dan Kelurahan dalam realisasi program KB di Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis?, 3) Bagaimana upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam mewujudkan efektivitas kinerja Tenaga Penggerak Desa dan Kelurahan dalam realisasi program KB di Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis ?

B. LANDASAN TEORI

Efektivitas berasal dari kata efektif yang mengandung pengertian dicapainya keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas selalu terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai. Efektivitas dapat dilihat dari berbagai sudut pandang (*view point*) dan dapat dinilai dengan berbagai cara dan mempunyai kaitan yang erat dengan efisiensi.

Menurut Sudirman (2002:31)

Efektivitas adalah:

“Pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah barang atas jasa kegiatan yang dijalankannya. Efektivitas menunjukkan keberhasilan dari segi tercapai tidaknya sasaran yang telah ditetapkan, jika hasil kegiatan semakin mendekati sasaran, berarti makin tinggi efektivitasnya”.

Kinerja merupakan tingkat pencapaian hasil atas pelaksanaan tugas tertentu. Dalam konteks pengembangan sumber daya manusia kinerja seorang karyawan dalam sebuah perusahaan sangat dibutuhkan untuk mencapai prestasi kerja bagi karyawan itu sendiri dan juga untuk keberhasilan perusahaan.

Menurut Mangkunegara (2004:67) kinerja adalah: “Hasil kerja secara kualitas dan kualitas yang dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya”.

TPD/TPK (Tenaga Penggerak Desa/Tenaga Penggerak Kelurahan) menurut BKKBN (2012:2) adalah :

“Petugas dari unsur BKKBN atau petugas lapangan KB yang tugasnya untuk membina dan memberikan penyuluhan kepada calon akseptor KB dan orang-orang yang sudah masuk KB,

dengan terjun langsung ke masyarakat untuk mensosialisasikan program KKB agar tidak terjadi ledakan penduduk. Menerangkan kesehatan reproduksi remaja, pemberdayaan keluarga, penguatan kelembagaan dan jaringan KB”.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa Tenaga Penggerak Desa/Kelurahan merupakan pegawai BKKBN Provinsi yang ditugaskan di Kab/Kota untuk bergerak di lapangan di desa/kelurahan untuk memberikan penyuluhan dan pembinaan terhadap masyarakat dalam upaya untuk mensukseskan program keluarga sejahtera.

C. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini digunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Lamanya penelitian yang penulis lakukan kurang lebih 9 bulan. Informan dalam penelitian ini terdiri dari Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas PPKBP3A Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis sebanyak 1 orang, Tenaga Penggerak Desa (TPD) di Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis sebanyak 6 orang serta Mitra kerja Program KB Tingkat Desa dalam hal ini Kader Sebanyak 6 orang, dengan demikian jumlah informan dalam penelitian ini adalah sebanyak 13 orang.

Adapun teknik pengumpulan data menurut Subagyo (2004: 31) adalah sebagai berikut:

1. Studi Kepustakaan, yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mempelajari buku-buku dan bahan-bahan kepustakaan yang ada hubungannya dengan masalah yang sedang diteliti penulis.
2. Studi lapangan yaitu teknik pengumpulan data yang diperoleh secara langsung dilokasi penelitian dengan cara:
 - a. Observasi adalah cara pengambilan data dengan pengamatan tanpa ada alat standar lain untuk keperluan tersebut, yaitu mengadakan pengamatan langsung terhadap kegiatan operasional
 - b. Wawancara yaitu suatu kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung dan mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan pada informan.
3. Studi Dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda dan sebagainya.

D. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Efektivitas Kinerja Tenaga Penggerak Desa dan Kelurahan Dalam Realisasi Program KBolehUnit Pelaksana Teknis Dinas PPKBP3A Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis

Berdasarkan hasil penelitian tentang Efektivitas Kinerja Tenaga Penggerak Desa dan Kelurahan Dalam Realisasi Program KB oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas PPKBP3A Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis diketahui bahwa belum dilaksanakan secara maksimal hal ini terlihat dari pelaksanaan efektivitas waktu dimana belum tersusunnya jadwal kegiatan pertemuan di Desa/Kelurahan untuk mensosialisasikan program KB. Dengan demikian program KB belum dapat dilakukan secara cepat dan tepat, hal ini dikarenakan masih ada petugas Tenaga Penggerak Desa yang kurang pro aktif untuk menggerakkan kader dalam menyusun jadwal pertemuan untuk melaksanakan program KB serta kurangnya merangkul tokoh masyarakat baik formal maupun non formal menyebabkan kurang mendapatkan dukungan dalam pelaksanaan program KB sehingga dalam pelaksanaannya tidak sesuai dengan waktu yang telah di tentukan.

Diketahui juga selama ini masih kurangnya dilakukan komunikasi dengan para kader oleh UPTD sehingga kesulitan untuk menentukan jadwal pertemuan untuk melaksanakan program KB di Desa/Kelurahan serta masih ada sebagian pegawai yang kurang memahami tentang wilayah kerjanya, hal ini terlihat dari petugas TPD kurang mengenal para kadernya sehingga belum mampu melaksanakan program KB seperti pencatatan, penyuluhan dan pembinaan secara cepat sesuai dengan waktu yang telah di tentukan.

Di samping efektivitas waktu, efektivitas biaya perlu diperhatikan secara maksimal dalam mendukung efektivitas kinerja penggerak Desa/Kelurahan. Namun demikian diketahui dalam pelaksanaannya masih kurang maksimal sumber dana yang disediakan oleh Dinas PPKBP3A untuk pelaksanaan Program KB di Desa/Kelurahan hal ini terlihat dari kurangnya alat-alat keperluan untuk pelaksanaan Program KB seperti alat untuk keperluan penyuluhan, alat Kontrasepsi dan obat-obatan untuk menunjang Program KB. Serta kurang transparannya sumber dana dari kantor untuk menunjang pelaksanaan program KB di Desa/Kelurahan. Di samping itu

dalam pelaksanaan alokasi sumber dana diketahui masih kurangnya pemahaman petugas TPD terkait dengan penggunaan sumber dana. Keadaan seperti itu tercipta karena belum adanya petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis yang mengatur dalam penggunaan alokasi sumber dana yang harus digunakan secara efektif dan efisien.

Pelaksanaan prosedur belum dilaksanakan secara efektif, karena Lemahnya pimpinan dalam melakukan pengawasan mengakibatkan adanya petugas Tenaga Penggerak Desa/Kelurahan yang kurang bersungguh-sungguh dalam melaksanakan pekerjaannya. Sehingga mekanisme operasional tidak berjalan dengan baik dan petugas Tenaga Penggerak Desa/Kelurahan kurang menguasai wilayah kerjanya.

Dengan demikian lemahnya efektivitas waktu, efektivitas biaya dan efektivitas prosedur akan menciptakan lemahnya efektivitas persyaratan sehingga pelaksanaan program KB tidak sesuai dengan harapan dan keinginan masyarakat dan memberikan kemanfaatan dan kesejahteraan bagi masyarakat, hal ini terlihat belum adanya pusat konseling yang secara khusus sebagai sarana untuk dapat lebih mengetahui keluhan-keluhan dan harapan masyarakat terkait dengan pelaksanaan program KB di Desa/Kelurahan. Kurangnya waktu dari sebagian petugas Tenaga Penggerak Desa/Kelurahan untuk melakukan Konseling, lemahnya sebagian Petugas Tenaga Penggerak Desa/Kelurahan dalam melaksanakan perencanaan dalam melaksanakan program KB sehingga masyarakat belum merasakan manfaat yang signifikan dari program KB yang dilaksanakan.

Berdasarkan dari hasil penelitian di atas diketahui bahwa efektivitas kinerja Tenaga penggerak Desa belum dilaksanakan secara maksimal sebagaimana yang disampaikan oleh pendapat Siagian (2001:24) bahwa suatu organisasi akan tercipta suatu efektivitas apabila terpenuhinya Efektivitas Waktu, Efektivitas Biaya, Efektivitas Prosedur dan Efektivitas Persyaratan.

Dengan demikian untuk menciptakan efektivitas kinerja yang maksimal maka Tenaga Penggerak Desa/Kelurahan harus menciptakan efektivitas waktu yaitu harus Pro Aktif dalam menggerakkan Kader dan menyusun jadwal kegiatan Program KB di Tingkat Desa/Kelurahan dan melakukan komunikasi aktif kepada tokoh masyarakat agar tokoh masyarakat lebih mendukung program KB di Desa/ Kelurahan.

Untuk menciptakan optimalisasi efektivitas biaya maka Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebaiknya pengalokasian dana lebih transparan sehingga apabila diketahui alokasi dana belum maksimal maka sebaiknya alokasi dana untuk kegiatan tersebut diberikan penambahan.

Agar pelaksanaan kegiatan program KB berjalan dengan baik maka perlu diperhatikan Efektivitas prosedur dimana Kepala UPTD PPKBP3A harus melakukan pengawasan secara langsung ke lapangan agar pelaksanaan program KB tingkat Desa/Kelurahan berjalan dengan baik.

Untuk memenuhi efektivitas persyaratan maka Desa/Kelurahan sebaiknya menyediakan tempat untuk Pusat Konseling Masyarakat dalam menghadapi Keluhan-keluhan mengenai Program KB tingkat Desa/Kelurahan. Dan Petugas Tenaga Penggerak Desa harus mempunyai Rencana Kerja Mingguan dan Bulanan untuk melaksanakan Program KB, sehingga Program KB bisa sesuai dengan harapan dan keinginan masyarakat.

2. Hambatan-Hambatan yang dihadapi dalam Efektivitas Kinerja Tenaga Penggerak Desa dan Kelurahan Dalam Realisasi Program KB oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas PPKBP3A Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya hambatan-hambatan yang di hadapi, seperti kurangnya kepedulian sebagian masyarakat yang mau menjadi kader sehingga kesulitan untuk menyusun jadwal untuk melakukan pertemuan dalam rangka melaksanakan program KB, masih ada sebagian petugas TPD yang kurang mempersiapkan perencanaan yang matang dan belum mampu menggerakkan seluruh elemen masyarakat dalam pelaksanaan program KB sehingga dalam pelaksanaannya tidak sesuai dengan waktu yang telah di tentukan, kurangnya transparansi sumber dana dari kantor sehingga menghambat terhadap pelaksanaan program KB yang sedang dilaksanakan, belum adanya petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis tentang penggunaan alokasi dana yang efektif dan efisien untuk keperluan pelaksanaan program KB sehingga masih ada petugas yang kesulitan dalam penggunaannya, masih adanya petugas TPD yang jarang turun langsung ke lapangan untuk melakukan pembinaan dan penyuluhan terhadap

masyarakat, hal ini berdampak terhadap pemberian informasi tidak dapat di terima oleh masyarakat secara umum sehingga pelaksanaan program KB kurang sesuai dengan pedoman yang telah di tetapkan, masih ada petugas TPD yang kurang lengkap dalam membuat laporan mingguan dan laporan bulanan sehingga sulit untuk dilakukan evaluasi terkait dengan pelaksanaan program KB di Desa/Kelurahan, belum adanya pusat konseling yang secara khusus sebagai sarana untuk dapat lebih mengetahui keluhan-keluhan dan harapan masyarakat terkait dengan pelaksanaan program KB.

Berdasarkan hasil paparan tersebut di atas mengenai adanya hambatan-hambatan yang di hadapi dapat di simpulkan sebagai berikut:

1. Belum adanya pertemuan untuk menyusun jadwal pelaksanaan program KB.
2. Kurangnya dukungan dari sebagian tokoh masyarakat baik formal maupun non formal.
3. Petugas TPD kesulitan untuk mendapatkan sumber dana.
4. Kurangnya informasi dari pimpinan UPTD terkait dengan penggunaan alokasi dana yang efektif dan efisien untuk keperluan pelaksanaan program KB.
5. Kurangnya dilakukan pengawasan oleh pimpinan sehingga kurang mengetahui kesesuaian antara pelaksanaan dengan kondisi di lapangan yang sesuai dengan pedoman yang telah di tetapkan.
6. Sulitnya waktu untuk melakukan komunikasi dengan para kader sehingga belum mampu melakukan evaluasi secara menyeluruh terkait dengan pelaksanaan program KB.
7. Kurangnya waktu dari sebagian masyarakat peserta KB untuk melakukan komunikasi secara personal.
8. Kurangnya partisipasi dari para kader dan masyarakat terkait dengan pelaksanaan program KB sehingga belum mengetahui manfaat dari pelaksanaan program KB tersebut.

3. Upaya-Upaya Yang Dilakukan Untuk Mengatasi Hambatan-Hambatan yang dihadapi dalam Efektivitas Kinerja Tenaga Penggerak Desa dan Kelurahan Dalam Realisasi Program KB oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas PPKBP3A Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya upaya-upaya yang

dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan yang di hadapi, seperti merangkul tokoh formal dan informal untuk mengajak dan memilih masyarakat untuk mau berpartisipasi dalam pelaksanaan program KB di masyarakat agar dapat dilaksanakan secara rutin, mengintruksikan kepada para petugas TPD untuk mempersiapkan perencanaan yang matang dan merangkul semua elemen masyarakat agar dalam pelaksanaan program KB dapat dilaksanakan sesuai dengan waktu yang telah di tentukan, petugas TPD sudah berusaha untuk meminta kepada pimpinan untuk menyampaikan sumber dana secara transparan agar dapat mengalokasikan dana tersebut sesuai dengan kebutuhan operasional pelaksanaan program KB, mengeluarkan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis tentang penggunaan alokasi dana yang efektif dan efisien untuk keperluan pelaksanaan program KB sehingga petugas tidak kesulitan dalam penggunaannya, memberikan sanksi administrasi sampai dengan sanksi yang terberat terhadap para petugas TPD yang jarang turun langsung ke lapangan untuk melaksanakan pembinaan dan penyuluhan program KB terhadap masyarakat di Desa/Kelurahan, memberikan pengarah dan pembinaan terhadap para petugas TPD cara pembuatan laporan agar para petugas dapat membuat laporan dengan lengkap dan benar sehingga dapat mengetahui kesesuaian antara pelaksanaan dengan pedoman yang telah di tentukan, berusaha untuk mengajukan agar menyediakan pusat konseling di Desa/Kelurahan, hal ini untuk memudahkan petugas TPD untuk mengetahui segala keluhan, harapan dan keinginan dari masyarakat secara umum, melakukan sosialisasi dengan turun langsung ke masyarakat untuk memberikan informasi terkait dengan program KB sehingga dalam pelaksanaannya dapat memberikan manfaat dan dapat menjadikan keluarga yang sejahtera.

Berdasarkan hasil paparan di atas mengenai adanya upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan yang di hadapi, dapat di simpulkan sebagai berikut :

1. Melakukan pendekatan secara personal dengan para kader dan masyarakat di sela waktu senggang.
2. Merangkul para tokoh formal dan informal untuk mendapatkan dukungan.
3. Berusaha untuk mengajukan sumber dana untuk biaya pelaksanaan operasional program KB.
4. Melakukan rapat koordinasi dengan pimpinan untuk mendengarkan informasi

- terkait penggunaan alokasi dana untuk keperluan pelaksanaan program KB.
5. Menyarankan kepada pimpinan untuk melakukan pengawasan secara rutin dengan turun langsung ke lapangan.
 6. Melakukan komunikasi secara intensif walaupun di luar jam kerja dengan para kader agar dapat melakukan evaluasi secara menyeluruh.
 7. Merangkul semua elemen masyarakat untuk turut serta dalam pelaksanaan program KB agar dalam pelaksanaannya sesuai dengan harapan dan keinginan masyarakat secara umum.
 8. Memberikan dorongan dan motivasi terhadap masyarakat untuk berperan aktif dan berpartisipasi secara langsung dalam pelaksanaan program KB agar dapat dirasakan secara langsung manfaat dari program KB yang sedang dilaksanakan.

E. KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian bahwa efektivitas kinerja Tenaga Penggerak Desa dan Kelurahan dalam realisasi program KB di Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil penelitian mengenai efektivitas kinerja Tenaga Penggerak Desa dan Kelurahan dalam realisasi program KB di Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis belum dilaksanakan dengan optimal, seperti Tenaga Penggerak Desa yang kurang pro aktif untuk menggerakkan kader dalam menyusun jadwal pertemuan, kurangnya merangkul tokoh masyarakat baik formal maupun non formal menyebabkan kurang mendapatkan dukungan, kurangnya transparansi sumber dana dari kantor, kurangnya pemahaman dari para petugas TPD terkait dengan penggunaan sumber alokasi dana yang harus di gunakan secara efektif dan efisien, kurangnya dilakukan pengawasan oleh pimpinan sehingga kurang mengetahui kesesuaian antara pelaksanaan dengan kondisi di lapangan, kurangnya pimpinan turun langsung kelapangan terkait dengan pelaksanaan program KB sehingga kesulitan untuk melakukan evaluasi, belum adanya pusat konseling yang secara khusus, kurangnya sebagian petugas TPD menyusun perencanaan yang matang.

Sedangkan berdasarkan hasil observasi kurangnya dilakukan komunikasi dengan para kader sehingga kesulitan untuk menentukan jadwal, sebagian pegawai yang kurang memahami tentang wilayah kerjanya, kurangnya sumber dana yang disediakan oleh para petugas TPD, belum adanya petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis yang mengatur tentang penggunaan alokasi sumber dana, masih ada petugas TPD yang kurang bersungguh-sungguh dalam melaksanakan pekerjaannya, kurangnya waktu dari sebagian petugas TPD untuk melakukan konseling dengan masyarakat, belum adanya peningkatan pelayanan dalam pelaksanaan program KB.

2. Berdasarkan hasil penelitian mengenai adanya hambatan-hambatan seperti kurangnya kepedulian sebagian masyarakat yang mau menjadi kader, masih ada sebagian petugas TPD yang kurang mempersiapkan perencanaan yang matang, kurangnya transparansi sumber dana dari kantor, belum adanya petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis tentang penggunaan alokasi dana yang efektif dan efisien, adanya petugas TPD yang jarang turun langsung ke lapangan, masih ada petugas TPD yang kurang lengkap dalam membuat laporan, belum adanya pusat konseling di Desa, kurangnya dilakukan sosialisasi. Begitupula dengan hasil observasi terlihat belum adanya pertemuan untuk menyusun jadwal, kurangnya dukungan dari sebagian tokoh masyarakat baik formal maupun non formal, kesulitan untuk mendapatkan sumber dana, Kurangnya informasi dari pimpinan UPTD, kurangnya dilakukan pengawasan oleh pimpinan, sulitnya waktu untuk melakukan komunikasi dengan para kader, kurangnya waktu dari sebagian masyarakat, kurangnya partisipasi dari para kader dan masyarakat terkait dengan pelaksanaan program KB.
3. Berdasarkan hasil penelitian mengenai adanya upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan seperti merangkul tokoh formal dan informal untuk mengajak dan memilih masyarakat untuk mau berpartisipasi, mempersiapkan perencanaan yang matang dan merangkul semua elemn masyarakat, meminta kepada pimpinan untuk menyampaikan sumber

dana secara transparan, mengeluarkan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis tentang penggunaan alokasi dana yang efektif dan efisien, memberikan sanksi administrasi sampai dengan sanksi yang terberat terhadap para petugas TPD yang jarang turun langsung ke lapangan, memberikan pengarah dan pembinaan terhadap para petugas TPD cara pembuatan laporan, menyediakan pusat konseling di Desa/Kelurahan, melakukan sosialisasi dengan turun langsung ke masyarakat untuk memberikan informasi terkait dengan program KB. Begitupula dengan hasil observasi yang dilakukan oleh penulis terlihat bahwa adanya upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan yang dirasakan seperti melakukan pendekatan secara personal dengan para kader dan masyarakat, merangkul para tokoh formal dan informal untuk mendapatkan dukungan, mengajukan sumber dana untuk biaya pelaksanaan operasional, melakukan rapat koordinasi dengan pimpinan untuk mendengarkan informasi terkait penggunaan alokasi dana, melakukan pengawasan secara rutin dengan turun langsung ke lapangan, melakukan komunikasi secara intensif walaupun di luar jam kerja, memberikan dorongan dan motivasi terhadap masyarakat untuk berperan aktif dan berpartisipasi secara langsung dalam pelaksanaan program KB.

2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian maka penulis menyampaikan saran sebagai berikut :

1. Untuk tercapainya efektivitas kinerja TPD/K dalam realisasi program KB maka sebaiknya dilakukan dengan cara melakukan pendekatan secara personal dengan mendatangi rumah masyarakat secara langsung untuk memberikan dorongan dan motivasi agar mau berperan aktif dan berpartisipasi dalam pelaksanaan program KB serta merangkul tokoh formal dan informal agar dalam pelaksanaannya mendapatkan dukungan sehingga tujuan dan visi misi program KB dapat tercapai sesuai dengan yang telah ditetapkan.
2. Saran untuk hambatan-hambatan yang timbul maka sebaiknya, petugas Tenaga Penggerak Desa melakukan pembinaan dan penyuluhan terhadap masyarakat

secara rutin dan berkesinambungan agar informasi terkait dengan pelaksanaan program KB dapat di terima dan dipahami oleh masyarakat secara keseluruhan secara jelas dan terperinci sehingga masyarakat tertarik dan tergerak untuk berperan aktif dan berpartisipasi dalam pelaksanaan program KB sebagai dasar untuk menuju keluarga kecil yang sejahtera.

3. Saran untuk upaya-upaya untuk mengatasi hambatan-hambatan yang timbul maka sebaiknya PPKBP3A di Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis menyediakan sumber dana dan sarana prasarana seperti obat-obatan, alat kontrasepsi serta adanya pusat konseling yang memadai untuk keperluan pelaksanaan program KB agar pelaksanaan program dapat dilakukan secara baik dan diterima serta dipahami oleh masyarakat secara umum sehingga masyarakat dapat merasakan hasil dan manfaat dari pelaksanaan program KB yang sedang dilaksanakan.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku :

- Anwar Prabu Mangkunegara. 2004. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Perusahaan cetakan pertama, penerbit PT. Remaja Rsodakarya. Bandung
- Sudirman. 2002. *Pengaruh Motivasi Kerja Terhadap Efektifitas Pelayanan*. Bandung: Primako Akademika.
- Subagyo, Pangestu. 2004. *Statistik Terapan*. Yogyakarta: BPFE.

Sumber Perundang-undangan

- BKKBN. 2012. *Evaluasi Program Kependudukan dan KB*. Semarang

IDENTITAS PENULIS

Venni Sukmawati, tempat/tanggal lahir: Ciamis 25 Januari 1985. Penulis tinggal di Dusun Ciwahangan Rt/Rw 08/011 Desa Imbanagara Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis. Dari tahun 2013 tercatat sebagai mahasiswi di Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Galuh Ciamis.